

BAB 1V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui:
 - a. Melakukan *update* data kemiskinan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).
 - b. Memfasilitasi program bantuan sosial PKH dan program sembako.
 - c. Pengusulan pembaruan data bansos melalui aplikasi SIKS-NG.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:
 - a. Sebaran bantuan PKH yang belum tepat sasaran.
 - b. Kurangnya sebaran pendamping sosial PKH di lapangan.
 - c. Belum terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) untuk KPM lulusan PKH.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui;
 - a. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan DTSEN dalam menghadapi sebaran bantuan PKH yang belum tepat sasaran.
 - b. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Wali Nagari, Camat, Serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekabupaten Agam dalam upaya penanggulangan kurangnya sebaran pendamping sosial PKH di lapangan.
 - c. Pemerintah Kabupaten Agam membentuk pusat pemberdayaan di setiap kecamatan dalam mengatasi kendala PPSE.

B. Saran

Sebagaimana dari hasil analisa penulis tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pengentasan Kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Maka dari itu ada beberapa saran dari penulis dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam menjalankan perannya melalui Dinas Sosial Kabupaten Agam:

1. Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya lebih fokus lagi dan teliti dalam melakukan pemantauan penyebaran bantuan PKH yang belum tepat sasaran dan evaluasi menyeluruh melalui Pemerintah Nagari agar bansos yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

2. Pemerintah Kabupaten Agam harusnya lebih mengoptimalkan lagi terkait jumlah sebaran pendamping sosial yang disebar di seluruh wilayah Kabupaten Agam agar PKH dapat berjalan lebih maksimal.
3. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam harusnya lebih seius lagi dalam memperhatikan kendala pelaksanaan program pemberdayaan PPSE agar KPM yang sudah mandiri dan lulus dari PKH tidak kembali merasakan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Astri Yuliana, Zaenal Abidin, Sri Kadarsih, 2024, *Program Keluarga Harapan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Meriva Media, Jambi.
- Bambang Rustanto, 2015, *Menangani Kemiskinan*, Remaja Rosdakarya PT, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Defi Arfiani, 2009, *Berantas Kemiskinan*, Alprin, Semarang.
- Janu Murdityatmo, 2007, “*Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*”, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Neil Hawke, dkk, 2021, *Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 40/3/HK.01/7/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

C. Sumber Lain

Amelia Kurnia Fajri, dkk, 2022, Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan, *Gema Publica*, Vol. 7, No. 1.

Amalia Citra Novianantya, 2024, *Apa Itu Bansos DTKS dan Non DTKS? Simak Perbedaan, Cara Pendaftaran dan Jenis Bantuan Yang Diterima*, <https://www.mengerti.id/news/66413167621/apa-itu-bansos-dtks-dan-non-dtks-simak-perbedaan-cara-pendaftaran-dan-jenis-bantuan-yang-diterima>, diakses 23 November 2025.

BPS Kota Padang, *Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*, 2025.

BPS Sumatera Barat, *Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*, 2025

Danur Lambang Pristiandaru, 2024, *Apa Itu Bansos DTKS dan Non DTKS? Simak Perbedaan, Cara Pendaftaran dan Jenis Bantuan Yang Diterima, Pengertian Kemiskinan, Jenis, dan Dampaknya*, https://les-tari.kompas.com/read/2023/05/10/140000586/pengertiankemiskinan-jenisdandampaknya?lgn_method=google&googlebtn=gsi, diakses 11 Oktober 2025.

Editorialindonesia.id, 2025, *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Strategi dan Program*, <https://editorialindonesia.id/2025/01/28/mengatasi-kemiskinan-di-indonesia-strategi-dan-program/>, diakses 09 Oktober 2025.

Githa Asmadeningrum Rosady, dkk, 2023, Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 2.

Infopublik.id, *Jumlah Warga Agam Masuk DTKS, Capai 270.179 Orang*, 2024, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang>, diakses 14 Oktober 2025.

- Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2025, *Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial Republik Indonesia*, Jakarta, <https://kemensos.go.id>, diakses 11 Oktober 2025.
- KPU Kab-Pegununganbintang, 2025, *NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025: Panduan Lengkap Cara Cek, Syarat, Prosedur Pencairan, dan Tips Validasi Data*, <https://share.google/4o5JKzFAt3xpBx4WJ>, diakses 22 November 2025.
- M. Yakub, Nuli Purwanti, 2023, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, *Accident Analysis and Prevention*, Vol. 5, No. 2.
- Novi Widianingrum, Anggraeni Eksi Wahyuni, 2024 Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 1.
- Nur Rizka Sari, 2025, *Kemiskinan*, <https://bappeda.agamkab.go.id/Pojok/detail/59>, diakses 06 Oktober 2025.
- Nur Sawitri, dkk, 2024, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 6, No. 1.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020, *Penjelasan Ditolaknya Pendaftar Sebagai Penerima Bansos Provinsi*, <https://solidaritas.jabarprov.go.id/rejectdescription/?hl=id-ID>, diakses 23 November 2025.
- PIC Public Relation, 2020, *Hak dan Kewajiban KPM – PKH Tuban*, <https://share.google/RRL3sAFS1suaMFTl5>, diakses 11 Oktober 2025.
- Rif’atul Mahmudah, Ahmad Baihaqi, Jumaidi, 2025, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, 2023, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponogoro Tentang Penanggulangan Kemiskinan*, JDH DPRD Kabupaten Ponogoro, hlm. 1, <https://jdih-dprd.ponorogo.go.id/assets/peraturan/1740633479-file-52raperda-penanggulangan-kemiskinan.pdf>, diakses 23 November 2025.